



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 627 TAHUN 2016
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan khususnya area perubahan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara maka perlu dilakukan penetapan jabatan dan kelas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 434 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Pelaksana di Kementerian Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Jabatan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. jabatan Fungsional; dan
- c. jabatan Administrasi.

KEDUA : Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi dalam kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penetapan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk menentukan penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan dan sistem penggajian yang sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 627 TAHUN 2016
 TENTANG
 JABATAN DAN KELAS JABATAN
 DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO.	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Menteri Ketenagakerjaan	-
	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	
2.	Sekretaris Jenderal	17
3.	Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas	17
4.	Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	17
5.	Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja	17
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	17
7.	Inspektur Jenderal	17
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	17
9.	Staf Ahli Menteri Bidang Otonomi Daerah	16
10.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan SDM	16
11.	Staf Ahli Menteri Bidang Kependudukan	16
12.	Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah	16
13.	Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional	16
	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
14.	Kepala Biro Perencanaan	15
15.	Kepala Biro Keuangan	15
16.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15
17.	Kepala Biro Hukum	15
18.	Kepala Biro Umum	15
19.	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri	15

NO.	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS JABATAN
1	2	3
20.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
21.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	15
22.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
23.	Inspektur I	15
24.	Inspektur II	15
25.	Inspektur III	15
26.	Inspektur IV	15
27.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	15
28.	Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	15
29.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan	15
30.	Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan	15
31.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	15
32.	Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	15
33.	Direktur Bina Pemagangan	15
34.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan	15
35.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	15
36.	Direktur Bina Produktivitas	15
37.	Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	15
38.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	15
39.	Direktur Pengembangan Pasar Kerja	15
40.	Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	15
41.	Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	15
42.	Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	15
43.	Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	15
44.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja	15
45.	Direktur Persyaratan Kerja	15
46.	Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	15
47.	Direktur Pengupahan	15
48.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
49.	Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	15
50.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
51.	Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
52.	Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15

NO.	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS JABATAN
1	2	3
53.	Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	15
54.	Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	15
55.	Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
56.	Kepala Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar	14
57.	Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas Bekasi	14
58.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan	14
59.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang	14
60.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi	14
61.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung	14
62.	Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang	14
63.	Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja Lembang	14

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 627 TAHUN 2016
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
1	2	3
	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN	
1.	Arsiparis Utama	13
2.	Auditor Utama	13
3.	Dokter Utama	13
4.	Dokter Gigi Utama	13
5.	Peneliti Utama	13
6.	Penerjemah Utama	13
7.	Pengantar Kerja Utama	13
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama	13
9.	Perekayasa Utama	13
10.	Perencana Utama	13
11.	Pranata Komputer Utama	13
12.	Pustakawan Utama	13
13.	Statistisi Utama	13
14.	Widyaiswara Utama	13
15.	Analisis Kepegawaian Madya	11
16.	Arsiparis Madya	11
17.	Auditor Madya	11
18.	Auditor Kepegawaian Madya	11
19.	Dokter Madya	11
20.	Dokter Gigi Madya	11
21.	Instruktur Madya	11
22.	Mediator Hubungan Industrial Madya	11
23.	Peneliti Madya	11
24.	Penerjemah Madya	11
25.	Pengantar Kerja Madya	11
26.	Pengawas Ketenagakerjaan Madya	11
27.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11
28.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Madya	11
29.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	11
30.	Perawat Madya	11
31.	Perekayasa Madya	11

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
1	2	3
32.	Perencana Madya	11
33.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
34.	Pranata Komputer Madya	11
35.	Pustakawan Madya	11
36.	Statistisi Madya	11
37.	Widyaiswara Madya	11
38.	Analisis Kepegawaian Muda	9
39.	Arsiparis Muda	9
40.	Auditor Muda	9
41.	Auditor Kepegawaian Muda	9
42.	Dokter Gigi Muda	9
43.	Dokter Muda	9
44.	Instruktur Muda	9
45.	Mediator Hubungan Industrial Muda	9
46.	Peneliti Muda	9
47.	Penerjemah Muda	9
48.	Pengantar Kerja Muda	9
49.	Pengawas Ketenagakerjaan Muda	9
50.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9
51.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda	9
52.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	9
53.	Perawat Muda	9
54.	Perekayasa Muda	9
55.	Perencana Muda	9
56.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
57.	Pranata Komputer Muda	9
58.	Pustakawan Muda	9
59.	Statistisi Muda	9
60.	Widyaiswara Muda	9
61.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
62.	Arsiparis Pertama	8
63.	Auditor Pertama	8
64.	Auditor Kepegawaian Pertama	8
65.	Dokter Gigi Pertama	8
66.	Dokter Pertama	8
67.	Instruktur Pertama	8
68.	Mediator Hubungan Industrial Pertama	8
69.	Peneliti Pertama	8
70.	Penerjemah Pertama	8
71.	Pengantar Kerja Pertama	8
72.	Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	8
73.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8
74.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8
75.	Perawat Pertama	8
76.	Perekayasa Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
1	2	3
77.	Perencana Pertama	8
78.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
79.	Pranata Komputer Pertama	8
80.	Pustakawan Pertama	8
81.	Statistisi Pertama	8
82.	Widyaiswara Pertama	8
	JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL	
83.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
84.	Arsiparis Penyelia	8
85.	Auditor Penyelia	8
86.	Instruktur Penyelia	8
87.	Perawat Gigi Penyelia	8
88.	Perawat Penyelia	8
89.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
90.	Pranata Komputer Penyelia	8
91.	Pustakawan Penyelia	8
92.	Statistisi Penyelia	8
93.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	8
94.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
95.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
96.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
97.	Instruktur Pelaksana Lanjutan	7
98.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
99.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
100.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
101.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
102.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
103.	Statistisi Pelaksana Lanjutan	7
104.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan	7
105.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
106.	Arsiparis Pelaksana	6
107.	Auditor Pelaksana	6
108.	Instruktur Pelaksana	6
109.	Perawat Gigi Pelaksana	6
110.	Perawat Pelaksana	6
111.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
112.	Pranata Komputer Pelaksana	6
113.	Pustakawan Pelaksana	6
114.	Statistisi Pelaksana	6
115.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana	6
116.	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5
117.	Perawat Pelaksana Pemula	5

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
1	2	3
118.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5
119.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
120.	Statistisi Pelaksana Pemula	5
121.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula	5

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 627 TAHUN 2016
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN ADMINISTRASI

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
	JABATAN ADMINISTRATOR (KHUSUS KEPALA BALAI)	
1.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta	13
2.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan	13
3.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung	13
4.	Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda	13
5.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Banda Aceh	13
6.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Padang	13
7.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Surakarta	13
8.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Samarinda	13
9.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Makassar	13
10.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Kendari	13
11.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Ternate	13
12.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Ambon	13
13.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas I Sorong	13
14.	Kepala Balai Peningkatan Produktivitas Kendari	13
15.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas II Lembang	11
16.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas II Lombok Timur	11
17.	Kepala Balai Latihan Kerja Kelas II Bantaeng	11
	JABATAN ADMINISTRATOR	
18.	Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro Perencanaan	11
19.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan	11
20.	Kepala Bagian Pemantauan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan	11
21.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan	11
22.	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan, Biro Keuangan	11
23.	Kepala Bagian Penatalaksanaan Anggaran, Biro Keuangan	11
24.	Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan	11

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
25.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro Keuangan	11
26.	Kepala Bagian Organisasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian	11
27.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian	11
28.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian	11
29.	Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin Kepegawaian, Biro Organisasi dan Kepegawaian	11
30.	Kepala Bagian Penelahaan Hukum & Konvensi Internasional, Biro Hukum	11
31.	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum	11
32.	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum	11
33.	Kepala Bagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum	11
34.	Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Biro Umum	11
35.	Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan, Biro Umum	11
36.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian, Biro Umum	11
37.	Kepala Bagian Kerjasama Bilateral dan Administrasi Kerja Sama Luar Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri	11
38.	Kepala Bagian Kerjasama Regional, Biro Kerjasama Luar Negeri	11
39.	Kepala Bagian Kerja Sama Multilateral, Biro Kerjasama Luar Negeri	11
40.	Kepala Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan, Biro Hubungan Masyarakat	11
41.	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat	11
42.	Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat	11
43.	Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	11
44.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	11
45.	Kepala Bidang Penyelenggaraan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	11
46.	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Set Barenbang	11
47.	Kepala Bagian Keuangan, Set Barenbang	11
48.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set Barenbang	11
49.	Kepala Bidang Pengukuran dan Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	11
50.	Kepala Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Makro, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	11
51.	Kepala Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Mikro, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan	11

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
52.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pusdatin	11
53.	Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pusdatin	11
54.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika, Pusdatin	11
55.	Kepala Bidang Penelitian Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Puslitbang	11
56.	Kepala Bidang Penelitian Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Puslitbang	11
57.	Kepala Bidang Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan, Puslitbang	11
58.	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Set Itjen	11
59.	Kepala Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan, Set Itjen	11
60.	Kepala Bagian Pengawasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Set Itjen	11
61.	Kepala Bagian Umum, Set Itjen	11
62.	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Set Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	11
63.	Kepala Bagian Keuangan, Set Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	11
64.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Set Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	11
65.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	11
66.	Kepala Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama Produktivitas, Ditjen Binalattas	11
67.	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Penerapan Sistem dan Metoda Produktifitas, Ditjen Binalattas	11
68.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Lembaga Produktivitas, Ditjen Binalattas	11
69.	Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Analisis Produktivitas, Ditjen Binalattas	11
70.	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi, Ditjen Binalattas	11
71.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	11
72.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Metoda Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	11
73.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	11
74.	Kepala Subdirektorat Standar Mutu Lembaga, Ditjen Binalattas	11
75.	Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Lembaga, Ditjen Binalattas	11
76.	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pelatihan, Ditjen Binalattas	11
77.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan, Ditjen Binalattas	11
78.	Kepala Subdirektorat Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah, Ditjen Binalattas	11

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
79.	Kepala Subdirektorat Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta, Ditjen Binalattas	11
80.	Kepala Subdirektorat Tenaga Pelatihan Pemerintah, Ditjen Binalattas	11
81.	Kepala Subdirektorat Tenaga Pelatihan Swasta, Ditjen Binalattas	11
82.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pemagangan Dalam Negeri, Ditjen Binalattas	11
83.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pemagangan Luar Negeri, Ditjen Binalattas	11
84.	Kepala Subdirektorat Perizinan dan Advokasi Pemagangan, Ditjen Binalattas	11
85.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jejaring Pemagangan, Ditjen Binalattas	11
86.	Kepala Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum, Set. BNSP	11
87.	Kepala Bagian Kerja Sama Kelembagaan Sertifikasi, Set. BNSP	11
88.	Kepala Bagian Sistem Sertifikasi dan Informasi, Set. BNSP	11
89.	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Set Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
90.	Kepala Bagian Keuangan, Set Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
91.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Set Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
92.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
93.	Kepala Subdirektorat Analis Pasar Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
94.	Kepala Subdirektorat Informasi Pasar Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
95.	Kepala Subdirektorat Analisis Jabatan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
96.	Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
97.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
98.	Kepala Subdirektorat Bursa Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
99.	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Pengantar Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
100.	Kepala Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
101.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
102.	Kepala Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
103.	Kepala Subdirektorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
104.	Kepala Subdirektorat Kerja Sama Antar Lembaga, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
105.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Padat Karya, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
106.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
107.	Kepala Subdirektorat Pendampingan Dan Kerja Sama Antar Lembaga, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
108.	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
109.	Kepala Subdirektorat Analisis Dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
110.	Kepala Subdirektorat Analisis Dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
111.	Kepala Subdirektorat Analisis Dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Sektor Pertanian Dan Maritim, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
112.	Kepala Subdirektorat Analisis Dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
113.	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Set Ditjen PHI & Jamsos	11
114.	Kepala Bagian Keuangan, Set Ditjen PHI & Jamsos	11
115.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Set Ditjen PHI & Jamsos	11
116.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set Ditjen PHI & Jamsos	11
117.	Kepala Subdirektorat Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama, Ditjen PHI & Jamsos	11
118.	Kepala Subdirektorat Hubungan Kerja, Ditjen PHI & Jamsos	11
119.	Kepala Subdirektorat Kesetaraan Syarat Kerja, Ditjen PHI & Jamsos	11
120.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, Ditjen PHI & Jamsos	11
121.	Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan, Ditjen PHI & Jamsos	11
122.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengupahan, Ditjen PHI & Jamsos	11
123.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga, Ditjen PHI & Jamsos	11
124.	Kepala Subdirektorat Kepesertaan Jaminan Sosial, Ditjen PHI & Jamsos	11

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
125.	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha, Ditjen PHI & Jamsos	11
126.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Hubungan Industrial, Ditjen PHI & Jamsos	11
127.	Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Ditjen PHI & Jamsos	11
128.	Kepala Subdirektorat Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI & Jamsos	11
129.	Kepala Subdirektorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI & Jamsos	11
130.	Kepala Subdirektorat Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI & Jamsos	11
131.	Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Set Ditjen Binwasnaker & K3	11
132.	Kepala Bagian Keuangan, Set Ditjen Binwasnaker & K3	11
133.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Set Ditjen Binwasnaker & K3	11
134.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set Ditjen Binwasnaker & K3	11
135.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Binwasnaker & K3	11
136.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat, Binwasnaker & K3	11
137.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan pengupahan, Binwasnaker & K3	11
138.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Binwasnaker & K3	11
139.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, Binwasnaker & K3	11
140.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan, Binwasnaker & K3	11
141.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Perlindungan Pekerja Anak, Binwasnaker & K3	11
142.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Binwasnaker & K3	11
143.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap, dan Bejana Tekan, Binwasnaker & K3	11
144.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik, dan Penanggulangan Kebakaran, Binwasnaker & K3	11
145.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Kesehatan Kerja, Binwasnaker & K3	11
146.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya, Binwasnaker & K3	11

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
147.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwasnaker & K3	11
148.	Kepala subdirektorat tenaga pengawas ketenagakerjaan dan tata laksana, Binwasnaker & K3	11
149.	Kepala Subdirektorat Lembaga dan Sarana Pengawasan Ketenagakerjaan, Binwasnaker & K3	11
150.	Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwasnaker & K3	11
151.	Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwasnaker & K3	11
152.	Kepala Subdirektorat Sarana dan Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwasnaker & K3	11
153.	Kepala Subdirektorat Pengkajian dan Standardisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwasnaker & K3	11
154.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwasnaker & K3	11
155.	Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, Set. barenbang	11
156.	Kepala Bagian Keuangan, Set. Barenbang	11
157.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set. Barenbang	11
158.	Kepala Bidang Pengukuran dan Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan, Barenbang	11
159.	Kepala Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Makro, Barenbang	11
160.	Kepala Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan Mikro, Barenbang	11
161.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja, Barenbang	11
162.	Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Barenbang	11
163.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika, Barenbang	11
164.	Kepala Bidang Penelitian Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Barenbang	11
165.	Kepala Bidang Penelitian Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Barenbang	11
166.	Kepala Bidang Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan, Barenbang	11
167.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi, pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
168.	Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11
169.	Kepala Bagian Tata Usaha, pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	11

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
170.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi, pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	11
171.	Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	11
172.	Kepala Bagian Tata Usaha, pada Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	11
173.	Kepala Bidang Pelayanan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	11
174.	Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, pada Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	11
175.	Kepala Bagian Tata Usaha, pada Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	11
176.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi, pada Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	11
177.	Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, pada Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	11
178.	Kepala Bagian Tata Usaha, pada Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	11
	JABATAN PENGAWAS	
179.	Kepala Subbagian Perencanaan Umum I, Biro Perencanaan	9
180.	Kepala Subbagian Perencanaan Umum II, Biro Perencanaan	9
181.	Kepala Subbagian Perencanaan Umum III, Biro Perencanaan	9
182.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan	9
183.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan	9
184.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III, Biro Perencanaan	9
185.	Kepala Subbagian Pemantauan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan	9
186.	Kepala Subbagian Pemantauan Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan	9
187.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan	9
188.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I, Biro Perencanaan	9
189.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II, Biro Perencanaan	9
190.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III, Biro Perencanaan	9
191.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Biro Keuangan	9
192.	Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Ganti Rugi, Biro Keuangan	9
193.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan	9
194.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran I, Biro Keuangan	9
195.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran II, Biro Keuangan	9
196.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran III, Biro Keuangan	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
197.	Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I, Biro Keuangan	9
198.	Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II, Biro Keuangan	9
199.	Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III, Biro Keuangan	9
200.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I, Biro Keuangan	9
201.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II, Biro Keuangan	9
202.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III, Biro Keuangan	9
203.	Kepala Subbagian Kelembagaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
204.	Kepala Subbagian Kinerja Organisasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
205.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
206.	Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
207.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
208.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
209.	Kepala Subbagian Pengembangan Karir Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
210.	Kepala Subbagian Jabatan Fungsional, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
211.	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai I, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
212.	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai II, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
213.	Kepala Subbagian Disiplin dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
214.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian	9
215.	Kepala Subbagian Penelaahan Hukum, Biro Hukum	9
216.	Kepala Subbagian Evaluasi Konvensi Internasional, Biro Hukum	9
217.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum	9
218.	Kepala Subbagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Biro Hukum	9
219.	Kepala Subbagian Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Biro Hukum	9
220.	Kepala Subbagian Kesekretariatan, Biro Hukum	9
221.	Kepala Subbagian Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Biro Hukum	9
222.	Kepala Subbagian Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Biro Hukum	9
223.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan serta Pengawasan Intern, Biro Hukum	9
224.	Kepala Subbagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum	9
225.	Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Biro Hukum	9
226.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
227.	Kepala Subbagian Rumah Tangga, Biro Umum	9
228.	Kepala Subbagian Perlengkapan, Biro Umum	9
229.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum	9
230.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri, Biro Umum	9
231.	Kepala Subbagian TU Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri, Biro Umum	9
232.	Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum	9
233.	Kepala Subbagian Persuratan, Biro Umum	9
234.	Kepala Subbagian Pengelolaan Arsip, Biro Umum	9
235.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum	9
236.	Kepala Subbagian Kerjasama Bilateral, Biro KLN	9
237.	Kepala Subbagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri, Biro KLN	9
238.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro KLN	9
239.	Kepala Subbagian Kerja Sama ASEAN, Biro KLN	9
240.	Kepala Subbagian Kerja Sama Non ASEAN, Biro KLN	9
241.	Kepala Subbagian Kerja Sama ILO, Biro KLN	9
242.	Kepala Subbagian Kerja Sama Non ILO, Biro KLN	9
243.	Kepala Subbagian Analis Pendapat Umum, Biro Humas	9
244.	Kepala Subbagian Pemberitaan, Biro Humas	9
245.	Kepala Subbagian Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah dan Non Pemerintah, Biro Humas	9
246.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Humas	9
247.	Kepala Subbagian Layanan Informasi dan Pengaduan, Biro Humas	9
248.	Kepala Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro Humas	9
249.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, Pusat Diklat Pegawai	9
250.	Kepala Subbagian Umum, Pusat Diklat Pegawai	9
251.	Kepala Subbidang Program, Pusat Diklat Pegawai	9
252.	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan, Pusat Diklat Pegawai	9
253.	Kepala Subbidang Kepemimpinan dan Teknis, Pusat Diklat Pegawai	9
254.	Kepala Subbidang Fungsional Kerjasama, Pusat Diklat Pegawai	9
255.	Kepala Subbagian Penyusunan Program Dan Anggaran, Set Barenbang	9
256.	Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan, Set Barenbang	9
257.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran, Set Barenbang	9
258.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Set Barenbang	9
259.	Kepala Subbagian Akuntansi Dan Pelaporan, Set Barenbang	9
260.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Set Barenbang	9
261.	Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi, Set Barenbang	9
262.	Kepala Subbagian Umum, Set Barenbang	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
263.	Kepala Subbidang Pengukuran Pembangunan Ketenagakerjaan, Pusat PTK, Barenbang Ketenagakerjaan	9
264.	Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan Ketenagakerjaan, Pusat PTK, Barenbang Ketenagakerjaan	9
265.	Kepala Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan Sektoral, Pusat PTK, Barenbang Ketenagakerjaan	9
266.	Kepala Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan Daerah, Pusat PTK, Barenbang Ketenagakerjaan	9
267.	Kepala Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan Perusahaan Negara, Pusat PTK, Barenbang Ketenagakerjaan	9
268.	Kepala Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan Perusahaan Swasta, Pusat PTK, Barenbang Ketenagakerjaan	9
269.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat PTK, Barenbang Ketenagakerjaan	9
270.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pusdatin, Barenbang Ketenagakerjaan	9
271.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
272.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Hubungan Industrial, Pusdatin, Barenbang Ketenagakerjaan	9
273.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pusdatin, Barenbang Ketenagakerjaan	9
274.	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusdatin, Barenbang Ketenagakerjaan	9
275.	Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Informatika, Pusdatin, Barenbang Ketenagakerjaan	9
276.	Kepala Subbidang Penyajian Informasi Ketenagakerjaan, Pusdatin, Barenbang Ketenagakerjaan	9
277.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusdatin, Barenbang Ketenagakerjaan	9
278.	Kepala Subbidang Penelitian Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
279.	Kepala Subbidang Penelitian Penempatan Tenaga Kerja, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
280.	Kepala Subbidang Penelitian Hubungan Industrial, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
281.	Kepala Subbidang Penelitian Pengawasan Ketenagakerjaan, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
282.	Kepala Subbidang Kajian Kebijakan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
283.	Kepala Subbidang Kajian Kebijakan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
284.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Puslitbang, Barenbang Ketenagakerjaan	9
285.	Kepala Subbagian Program Dan Anggaran, Set Itjen	9
286.	Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan, set Itjen	9
287.	Kepala Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I, Set Itjen	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
288.	Kepala Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II, Set Itjen	9
289.	Kepala Subbagian Pengawasan Masyarakat, Set Itjen	9
290.	Kepala Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Set Itjen	9
291.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, Set Itjen	9
292.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Set Itjen	9
293.	Kepala Subbagian Tata Usaha, pada Inspektorat I, Inspektorat Jenderal	9
294.	Kepala Subbagian Tata Usaha, pada Inspektorat II, Inspektorat Jenderal	9
295.	Kepala Subbagian Tata Usaha, pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	9
296.	Kepala Subbagian Tata Usaha, pada Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal	9
297.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Setditjen Binalattas	9
298.	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Setditjen Binalattas	9
299.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Binalattas	9
300.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran, Setditjen Binalattas	9
301.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Setditjen Binalattas	9
302.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Setditjen Binalattas	9
303.	Kepala Subbagian Hukum, Setditjen Binalattas	9
304.	Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri, Setditjen Binalattas	9
305.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Setditjen Binalattas	9
306.	Kepala Subbagian Umum, Setditjen Binalattas	9
307.	Kepala Subbagian Perlengkapan, Setditjen Binalattas	9
308.	Kepala Seksi Promosi Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
309.	Kepala Seksi Kerja Sama Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
310.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Metoda Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
311.	Kepala Seksi Penerapan Sistem dan Metoda Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
312.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
313.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
314.	Kepala Seksi Pengukuran Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
315.	Kepala Seksi Analisis Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
316.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Bina Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
317.	Kepala Seksi Pengembangan Standar Kompetensi, Ditjen Binalattas	9
318.	Kepala Seksi Harmonisasi Standar Kompetensi, Ditjen Binalattas	9
319.	Kepala Seksi Pengembangan Program Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
320.	Kepala Seksi Pengembangan Materi Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
321.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
322.	Kepala Seksi Metode Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
323.	Kepala Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
324.	Kepala Seksi Evaluasi Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
325.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
326.	Kepala Seksi Penyusunan Standar Mutu Lembaga, Ditjen Binalattas	9
327.	Kepala Seksi Penjaminan Mutu Lembaga, Ditjen Binalattas	9
328.	Kepala Seksi Perizinan Lembaga, Ditjen Binalattas	9
329.	Kepala Seksi Akreditasi Lembaga, Ditjen Binalattas	9
330.	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Pelatihan, Ditjen Binalattas	9
331.	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Pelatihan, Ditjen Binalattas	9
332.	Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan, Ditjen Binalattas	9
333.	Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan, Ditjen Binalattas	9
334.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Bina Kelembagaan Pelatihan, Ditjen Binalattas	9
335.	Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Instruktur Tenaga Lembaga Pelatihan Pemerintah, Ditjen Binalattas	9
336.	Kepala Seksi Bimbingan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta, Ditjen Binalattas	9
337.	Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta, Ditjen Binalattas	9
338.	Kepala Seksi Bimbingan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta, Ditjen Binalattas	9
339.	Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Pemerintah, Ditjen Binalattas	9
340.	Kepala Seksi Bimbingan Karir Tenaga Pelatihan Pemerintah, Ditjen Binalattas	9
341.	Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Swasta, Ditjen Binalattas	9
342.	Kepala Seksi Bimbingan Karir Tenaga Pelatihan Swasta, Ditjen Binalattas	9
343.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Ditjen Binalattas	9
344.	Kepala Seksi Pengembangan Program Pemagangan Dalam Negeri, Ditjen Binalattas	9
345.	Kepala Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Ditjen Binalattas	9
346.	Kepala Seksi Pengembangan Program Pemagangan Luar Negeri, Ditjen Binalattas	9
347.	Kepala Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri, Ditjen Binalattas	9
348.	Kepala Seksi Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan, Ditjen Binalattas	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
349.	Kepala Seksi Advokasi Penyelenggaraan Pemagangan, Ditjen Binalattas	9
350.	Kepala Seksi Pengembangan Jejaring Pemagangan Dalam Negeri, Ditjen Binalattas	9
351.	Kepala Seksi Pengembangan Jejaring Pemagangan Luar Negeri, Ditjen Binalattas	9
352.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Bina Pemagangan, Ditjen Binalattas	9
353.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Regulasi, Set. BNSP	9
354.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Set. BNSP	9
355.	Kepala Subbagian Pemberdayaan dan Kerja Sama Lembaga Sertifikasi, Set. BNSP	9
356.	Kepala Subbagian Lisensi Lembaga Sertifikasi, Set. BNSP	9
357.	Kepala Subbagian Sistem Sertifikasi, Set. BNSP	9
358.	Kepala Subbagian Sistem Informasi, Set. BNSP	9
359.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
360.	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
361.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
362.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
363.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
364.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
365.	Kepala Subbagian Hukum, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
366.	Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
367.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
368.	Kepala Subbagian Umum, Setditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
369.	Kepala Seksi Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri, Ditjen Binapentasker	9
370.	Kepala Seksi Analisis Pasar Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapentasker	9
371.	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
372.	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
373.	Kepala Seksi Analisis dan Pengembangan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
374.	Kepala Seksi Analisis dan Informasi Jabatan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
375.	Kepala Seksi Penyuluhan Jabatan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
376.	Kepala Seksi Bimbingan Jabatan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
377.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Pengembangan Pasar Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
378.	Kepala Seksi Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
379.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal dan Daerah, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
380.	Kepala Seksi Bursa Kerja Pemerintah, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
381.	Kepala Seksi Bursa Kerja Swasta dan Khusus, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
382.	Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
383.	Kepala Seksi Kerja Sama Antar Lembaga, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
384.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Khusus Disabilitas dan Lanjut Usia, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
385.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
386.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit PTKDN, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	
387.	Kepala Seksi Analisis dan Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
388.	Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
389.	Kepala Seksi Promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
390.	Kepala Seksi Penyiapan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
391.	Kepala Seksi Perlindungan TKI Pra dan Purna Penempatan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
392.	Kepala Seksi Perlindungan TKI Masa Penempatan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
393.	Kepala Seksi Kerja Sama Lembaga Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
394.	Kepala Seksi Kerja Sama Lembaga Dalam Negeri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
395.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit PTKLN, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
396.	Kepala Seksi Padat Karya Infrastruktur, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
397.	Kepala Seksi Padat Karya Produktif, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
398.	Kepala Seksi Sektor Pertanian dan Maritim, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
399.	Kepala Seksi Jasa dan Industri Kreatif, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
400.	Kepala Seksi Pendampingan, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
401.	Kepala Seksi Kerja Sama Antar Lembaga, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
402.	Kepala Seksi Tenaga Kerja Mandiri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
403.	Kepala Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja Mandiri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
404.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
405.	Kepala Seksi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
406.	Kepala Seksi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
407.	Kepala Seksi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
408.	Kepala Seksi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
409.	Kepala Seksi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Pertanian dan Maritim, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
410.	Kepala Seksi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Pertanian dan Maritim, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
411.	Kepala Seksi Kawasan Ekonomi Khusus, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
412.	Kepala Seksi Kawasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
413.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit PPTKA, Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja	9
414.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
415.	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
416.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
417.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
418.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
419.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
420.	Kepala Subbagian Hukum, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
421.	Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
422.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
423.	Kepala Subbagian Umum, Setditjen Bina PHI dan Jamosos	9
424.	Kepala Seksi Peraturan Perusahaan, Ditjen Bina PHI dan Jamosos	9
425.	Kepala Seksi Perjanjian Kerja Bersama, Ditjen Bina PHI dan Jamosos	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
426.	Kepala Seksi Fasilitas Perjanjian Kerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
427.	Kepala Seksi Pengembangan Perjanjian Kerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
428.	Kepala Seksi Pencegahan Diskriminasi Syarat Kerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
429.	Kepala Seksi Pengembangan Syarat Kerja Tanpa Diskriminasi, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
430.	Kepala Seksi Evaluasi Kesejahteraan Pekerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
431.	Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan Pekerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
432.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Persyaratan Kerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
433.	Kepala Seksi Standarisasi Pengupahan, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
434.	Kepala Seksi Fasilitas Pengupahan, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
435.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pengupahan, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
436.	Kepala Seksi Analisis Pengupahan, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
437.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Pengupahan, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
438.	Kepala Seksi Program, Iuran, dan Manfaat Jamsos, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
439.	Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Kerja Sama Antar Lembaga, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
440.	Kepala Seksi Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam dan Luar Hubungan Kerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
441.	Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
442.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
443.	Kepala Seksi Organisasi Pekerja, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
444.	Kepala Seksi Organisasi Pengusaha, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
445.	Kepala Seksi Lembaga Kerjasama Bipartit, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
446.	Kepala Seksi Lembaga Kerjasama Tripartit, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
447.	Kepala Seksi Kerjasama Hubungan Industrial, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
448.	Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
449.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
450.	Kepala Seksi Deteksi Dini, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
451.	Kepala Seksi Penanganan Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
452.	Kepala Seksi Pemberdayaan Penyelesaian Secara Bipartit, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
453.	Kepala Seksi Pemberdayaan Penyelesaian Secara Mediasi, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
454.	Kepala Seksi Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
455.	Kepala Seksi Jabatan Fungsional Mediator, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
456.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen Bina PHI dan Jamsos	9
457.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
458.	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
459.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
460.	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
461.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
462.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
463.	Kepala Subbagian Hukum, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
464.	Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
465.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
466.	Kepala Subbagian Umum, Setditjen Binwasnaker dan K3	9
467.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Binwasnaker dan K3	
468.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
469.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Hubungan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
470.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
471.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
472.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Pengupahan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
473.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kompensasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
474.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kepesertaan dan Kerja Sama Antar Lembaga Badan Penjamin Jaminan Sosial, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
475.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Norma Kerja dan Jamsostek, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
476.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Perlindungan Fungsi Reproduksi, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
477.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Perlindungan Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
478.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
479.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
480.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Anak Dalam Pekerjaan Ringan dan Pelatihan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
481.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Anak Dalam Pekerjaan Mengembangkan Bakat Minat, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
482.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Dalam Hubungan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
483.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Luar Hubungan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
484.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Norma Kerja Perempuan dan Anak, Ditjen Binwasnaker dan K3	
485.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Mekanik, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
486.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekanan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
487.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Konstruksi dan Bangunan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
488.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
489.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
490.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Pengendalian Penyakit Akibat Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
491.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Ergonomi dan Lingkungan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
492.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Bahan Berbahaya, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
493.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
494.	Kepala Seksi Pengawasan Norma Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
495.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Norma K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
496.	Kepala Seksi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
497.	Kepala Seksi Tata Laksana Pengawasan Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
498.	Kepala Seksi Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
499.	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
500.	Kepala Seksi Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
501.	Kepala Seksi Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
502.	Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
503.	Kepala Seksi Tindak Pidana Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
504.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Norma Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
505.	Kepala Seksi Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
506.	Kepala Seksi Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
507.	Kepala Seksi Pengkajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
508.	Kepala Seksi Standardisasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
509.	Kepala Seksi Kompetensi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
510.	Kepala Seksi Evaluasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
511.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit Bina K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
512.	Kepala Subbagian Keuangan, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapentasker	9
513.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapentasker	9
514.	Kepala Seksi Program, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapentasker	9
515.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapentasker	9
516.	Kepala Seksi Penyelenggaraan, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapentasker	9
517.	Kepala Seksi Pemberdayaan, Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapentasker	9
518.	Kepala Subbagian Keuangan, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
519.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
520.	Kepala Seksi Program, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
521.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
522.	Kepala Seksi Penyelenggaraan, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
523.	Kepala Seksi Pemberdayaan, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Ditjen Binalattas	9
524.	Kepala Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan, Balai Besar Pengembangan K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
525.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pengembangan K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
526.	Kepala Seksi Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Balai Besar Pengembangan K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
527.	Kepala Seksi Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Balai Besar Pengembangan K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
528.	Kepala Seksi Penyelenggaraan, Balai Besar Pengembangan K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
529.	Kepala Seksi Pemberdayaan, Balai Besar Pengembangan K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
530.	Kepala Subbagian Keuangan, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
531.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
532.	Kepala Seksi Program, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
533.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
534.	Kepala Seksi Penyelenggaraan, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
535.	Kepala Seksi Pemberdayaan, Balai Besar Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
536.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Balai Latihan Kerja Kelas I, Ditjen Binalattas	9
537.	Kepala Seksi Penyelenggaraan, Balai Latihan Kerja Kelas I, Ditjen Binalattas	9
538.	Kepala Seksi Pemberdayaan, Balai Latihan Kerja Kelas I, Ditjen Binalattas	9
539.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Latihan Kerja Kelas I, Ditjen Binalattas	9
540.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Balai Latihan Kerja Kelas II, Ditjen Binalattas	9
541.	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, Balai Latihan Kerja Kelas II, Ditjen Binalattas	9
542.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Latihan Kerja Kelas II, Ditjen Binalattas	9
543.	Kepala Seksi Program dan Evaluasi, Balai Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
544.	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, Balai Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
545.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Peningkatan Produktivitas, Ditjen Binalattas	9
546.	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pemberdayaan, Balai K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
547.	Kepala Seksi Pelayanan Teknis K3, Balai K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
548.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai K3, Ditjen Binwasnaker dan K3	9
	PELAKSANA DI KESEKRETARIATAN DAN TATA USAHA	
549.	Analisis Program dan Anggaran	7
550.	Analisis Evaluasi dan Pelaporan	7
551.	Analisis Laporan Keuangan dan SAI	7
552.	Analisis SDM dan Organisasi	7
553.	Analisis Hukum dan Organisasi	7

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
554.	Analisis Perbendaharaan	7
555.	Analisis Perencanaan Umum	7
556.	Analisis Pemantauan Program dan Anggaran	7
557.	Analisis Evaluasi dan Pelaporan	7
558.	Analisis Tata Usaha Keuangan dan Ganti Rugi	7
559.	Analisis Penatalaksanaan Anggaran	7
560.	Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara	7
561.	Analisis Akuntansi dan Pelaporan	7
562.	Analisis Jabatan	7
563.	Analisis Kelembagaan	7
564.	Analisis Kinerja Organisasi	7
565.	Analisis Sistem dan Prosedur	7
566.	Analisis Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	7
567.	Analisis Mutasi Pegawai	7
568.	Analisis Perundang-Undangan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7
569.	Analisis Perundang-undangan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	7
570.	Analisis Perundang-undangan Bidang Kesekretariatan	7
571.	Analisis Perundang-undangan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	7
572.	Analisis Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	7
573.	Analisis Perundang-undangan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan serta Pengawasan Intern	7
574.	Analisis Rumah Tangga	7
575.	Analisis Desain Interior	7
576.	Analisis Perlengkapan	7
577.	Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	7
578.	Analisis Protokoler	7
579.	Analisis Persuratan	7
580.	Analisis Pengelolaan Arsip	7
581.	Analisis Kerjasama Bilateral	7
582.	Analisis Kerjasama Luar Negeri	7
583.	Analisis Kerjasama ASEAN	7
584.	Analisis Kerjasama Non ASEAN	7
585.	Analisis Kerjasama ILO	7
586.	Analisis Kerjasama Non ILO	7
587.	Analisis Pendapat Umum	7
588.	Analisis Pemberitaan	7
589.	Analisis Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah dan Non Pemerintah	7
590.	Analisis Layanan Informasi & Pengaduan	7
591.	Analisis Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	7
592.	Analisis Program Diklat	7
593.	Analisis Evaluasi Diklat	7
594.	Analisis Diklat	7

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
595.	Jurnalis	7
596.	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	7
597.	Pengadministrasi Keuangan (khusus penugasan sebagai SPK Bendahara)	7
598.	Pengadministrasi Kepegawaian	6
599.	Pengadministrasi Keuangan	6
600.	Pengadministrasi Daftar Gaji	6
601.	Verifikator Keuangan	6
602.	Sekretaris	6
603.	Pengadministrasi Barang	6
604.	Pengadministrasi Persuratan	6
605.	Kameramen	6
606.	Penyusun Bahan Perencanaan Umum	6
607.	Penyusun Bahan Program dan Anggaran	6
608.	Penyusun Bahan Pemantauan Program dan Anggaran	6
609.	Penyusun Bahan Rapat Sekretaris Jenderal & Menteri	6
610.	Penyusun Bahan Perbendaharaan & TU Keuangan	6
611.	Penyusun Bahan Penatalaksanaan Anggaran	6
612.	Penyusun Bahan Penatausahaan BMN	6
613.	Penyusun Bahan Akuntansi dan Pelaporan	6
614.	Penyusun Bahan Organisasi	6
615.	Penyusun Bahan Ketatalaksanaan	6
616.	Penyusun Bahan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	6
617.	Penyusun Bahan Mutasi & Disiplin Pegawai	6
618.	Penyusun Bahan Penelaahan Hukum	6
619.	Penyusun Bahan Evaluasi Konvensi Internasional	6
620.	Penyusun Bahan Rancangan Perundang-undangan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6
621.	Penyusun Bahan Rancangan Perundang-undangan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	6
622.	Penyusun Bahan Rancangan Perundang-undangan Bidang Kesekretariatan	6
623.	Penyusun Bahan Rancangan Perundang-undangan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	6
624.	Penyusun Bahan Rancangan Perundang-undangan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	6
625.	Penyusun Bahan Rancangan Perundang-undangan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan serta Pengawasan Intern	6
626.	Penyusun Bahan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum	6
627.	Penyusun Bahan Advokasi Hukum	6
628.	Penyusun Bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum	6
629.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	6
630.	Penyusun Bahan Persuratan dan Kearsipan	6
631.	Penyusun Bahan Kerjasama Bilateral & Adminitrasi Kerjasama Luar Negeri	6
632.	Penyusun Bahan Kerjasama Regional	6

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
633.	Penyusun Bahan Kerjasama Multilateral	6
634.	Penyusun Bahan Pendapat Umum & Pemberitaan	6
635.	Penyusun Bahan Hubungan Antar Lembaga	6
636.	Penyusun Bahan Pelayanan Informasi Publik	6
637.	Penyusun Bahan Publikasi	6
638.	Penyusun Kurikulum, Modul, dan Bahan Ajar	6
639.	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat	6
640.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Diklat	6
641.	Pengadministrasi Penyelenggaraan Diklat	6
642.	Pengadministrasi Barang	6
643.	Pengadministrasi Poliklinik	6
644.	Pengadministrasi Data Kerumahtanggaan Kementerian	6
645.	Pengadministrasi Persuratan	6
646.	Penyusun Kliping	6
647.	Sekretaris	6
648.	Verifikator Keuangan	6
649.	Teknisi Bangunan dan Instalasi	6
650.	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	6
651.	Teknisi (Listrik/AC/Lift/Air/Telepon)	6
652.	Penyusun Bahan Pengawasan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	6
653.	Pengelola Pengaduan Publik	6
654.	Petugas Arsip	5
655.	Petugas Asrama	5
656.	Petugas Perpustakaan	5
657.	Petugas Protokoler Pimpinan	5
658.	Petugas Sarana Komunikasi	5
659.	Pengadministrasi Umum Satpam	5
660.	Pengemudi	5
661.	Komandan Satuan Pengamanan (Satpam)	5
662.	Wakil Komandan Satpam	5
663.	Anggota Satpam	5
664.	Montir	5
665.	Petugas Kantor	4
666.	Petugas Kebersihan	4
667.	Petugas Urusan Pemeliharaan Gedung Kantor	4
668.	Caraka	3
	PELAKSANA DI DITJEN BINALATTAS	
669.	Analisis Promosi dan Produktivitas	7
670.	Analisis Kerjasama Produktivitas	7
671.	Analisis Pengembangan Sistem dan Metoda Produktivitas	7
672.	Analisis Penerapan Sistem dan Metoda Produktivitas	7
673.	Analisis Pengembangan SDM Produktivitas	7
674.	Analisis Pemberdayaan Lembaga Produktivitas	7

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
675.	Analisis Pengukuran Produktivitas	7
676.	Analisis Analisis Produktivitas	7
677.	Analisis Pengembangan Standar Kompetensi	7
678.	Analisis Harmonisasi Standar Kompetensi	7
679.	Analisis Pengembangan Program Pelatihan Kerja	7
680.	Analisis Pengembangan Materi Pelatihan Kerja	7
681.	Analisis Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja	7
682.	Analisis Pengembangan Metoda Pelatihan Kerja	7
683.	Analisis Pengembangan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	7
684.	Analisis Evaluasi Pelatihan Kerja	7
685.	Analisis Penyusunan Standar Mutu Lembaga	7
686.	Analisis Penjaminan Mutu Lembaga	7
687.	Analisis Perizinan Lembaga	7
688.	Analisis Akreditasi Lembaga	7
689.	Analisis Pengembangan Sarana Pelatihan	7
690.	Analisis Pengembangan Prasarana Pelatihan	7
691.	Analisis Pengembangan Kemitraan	7
692.	Analisis Pengembangan Pendanaan	7
693.	Analisis Peningkatan Kompetensi Instruktur Tenaga Lembaga Pelatihan Pemerintah	7
694.	Analisis Bimbingan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah	7
695.	Analisis Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	7
696.	Analisis Bimbingan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	7
697.	Analisis Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Pemerintah	7
698.	Analisis Bimbingan Karir Tenaga Pelatihan Pemerintah	7
699.	Analisis Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan Swasta	7
700.	Analisis Bimbingan Karir Tenaga Pelatihan Swasta	7
701.	Analisis Pengembangan Program Pemagangan Dalam Negeri	7
702.	Analisis Pengembangan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri	7
703.	Analisis Pengembangan Program Pemagangan Luar Negeri	7
704.	Analisis Pengembangan Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri	7
705.	Analisis Perizinan Penyelenggaraan Program Pemagangan	7
706.	Analisis Advokasi Penyelenggaraan Pemagangan	7
707.	Analisis Pengembangan Jejaring Pemagangan Dalam Negeri	7
708.	Analisis Pengembangan Jejaring Pemagangan Luar Negeri	7
709.	Analisis Perencanaan dan Regulasi, Set. BNSP	7
710.	Analisis Pemberdayaan dan Kerja Sama Lembaga Sertifikasi, Set. BNSP	7
711.	Analisis Lisensi Lembaga Sertifikasi, Set. BNSP	7
712.	Analisis Sistem Sertifikasi, Set. BNSP	7
713.	Analisis Sistem Informasi, Set. BNSP	7

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
714.	Penyusun Bahan Promosi & Kerjasama Produktivitas	6
715.	Penyusun Bahan Pengembangan dan Penerapan Sistem dan Metoda Produktivitas	6
716.	Penyusun Bahan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Lembaga Produktivitas	6
717.	Penyusun Bahan Pengukuran dan Analisis Produktivitas	6
718.	Penyusun Bahan Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi	6
719.	Penyusun Bahan Pengembangan Program dan Materi Pelatihan Kerja	6
720.	Penyusun Bahan Pengembangan Sistem dan Metoda Pelatihan Kerja	
721.	Penyusun Bahan Pengembangan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelatihan Kerja	6
722.	Penyusun Bahan Standar Mutu Lembaga	6
723.	Penyusun Bahan Perizinan dan Akreditasi Lembaga	6
724.	Penyusun Bahan Sarana dan Prasarana Pelatihan	6
725.	Penyusun Bahan Pengembangan Kemitraan dan Pendanaan	6
726.	Penyusun Bahan Instruktur Lembaga Pelatihan Pemerintah	6
727.	Penyusun Bahan Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	6
728.	Penyusun Bahan Tenaga Pelatihan Pemerintah	6
729.	Penyusun Bahan Tenaga Pelatihan Swasta	6
730.	Penyusun Bahan Pengembangan Pemagangan Dalam Negeri	6
731.	Penyusun Bahan Pengembangan Pemagangan Luar Negeri	6
732.	Penyusunan Bahan Perizinan dan Advokasi Pemagangan	6
733.	Penyusun Bahan Pengembangan Jejaring Pemagangan	6
734.	Penyusun Bahan Perencanaan, Regulasi dan Umum, Set. BNSP	6
735.	Penyusun Bahan Kerja Sama Kelembagaan Sertifikasi, Set. BNSP	6
736.	Penyusun Bahan Sistem Sertifikasi dan Informasi, Set. BNSP	6
	PELAKSANA DI DITJEN BINAPENTA DAN PKK	
737.	Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri	7
738.	Analisis Pasar Kerja Luar Negeri	7
739.	Analisis Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri	7
740.	Analisis Informasi Pasar Kerja Luar Negeri	7
741.	Analisis dan Pengembangan	7
742.	Analisis Informasi Jabatan	7
743.	Analisis Penyuluhan Jabatan	7
744.	Analisis Bimbingan Jabatan	7
745.	Analisis Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja	7
746.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal dan Daerah	7
747.	Analisis Bursa Kerja Pemerintah	7
748.	Analisis Bursa Kerja Swasta dan Khusus	7
749.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
750.	Analisis Kerja Sama Antar Lembaga	7
751.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja Khusus Disabilitas dan Lansia	7

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
752.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita	7
753.	Analisis Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri	7
754.	Analisis Evaluasi Kinerja Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri	7
755.	Analisis Promosi Tenaga Kerja Luar Negeri	7
756.	Analisis Penyiapan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	7
757.	Analisis Perlindungan TKI Pra dan Purna Penempatan	7
758.	Analisis Perlindungan TKI Masa Penempatan	7
759.	Analisis Kerjasama Lembaga Luar Negeri	7
760.	Analisis Kerjasama Lembaga Dalam Negeri	7
761.	Analisis Padat Karya Infrastruktur	7
762.	Analisis Padat Karya Produktif	7
763.	Analisis Sektor Pertanian dan Maritim	7
764.	Analisis Sektor Jasa dan Industri Kreatif	7
765.	Analisis Pendampingan	7
766.	Analisis Kerjasama Antar Lembaga	7
767.	Analisis Tenaga Kerja Mandiri	7
768.	Analisis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja Mandiri	7
769.	Analisis RPTKA Sektor Industri	7
770.	Analisis Perizinan TKA Sektor Industri	7
771.	Analisis RPTKA Sektor Jasa	7
772.	Analisis Perizinan TKA Sektor Jasa	7
773.	Analisis RPTKA Sektor Pertanian dan Maritim	7
774.	Analisis Perizinan TKA Sektor Pertanian dan Maritim	7
775.	Analisis Kawasan Ekonomi Khusus	7
776.	Analisis Kawasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
777.	Penyusun Bahan Analisis Pasar Kerja	6
778.	Penyusun Bahan Informasi Pasar Kerja	6
779.	Penyusun Bahan Analisis Jabatan	6
780.	Penyusun Bahan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	6
781.	Penyusun Bahan Kelembagaan dan Penempatan Tenaga Kerja	6
782.	Penyusun Bahan Bursa Kerja	6
783.	Penyusun Bahan Pemberdayaan Pengantar Kerja	6
784.	Penyusun Bahan Tenaga Kerja Khusus	6
785.	Penyusun Bahan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri	6
786.	Penyusun Bahan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	6
787.	Penyusun Bahan Perlindungan TKI	6
788.	Penyusun Bahan Kerjasama Antar Lembaga	6
789.	Penyusun Bahan Pengembangan Padat Karya	6
790.	Penyusun Bahan Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna	6
791.	Penyusun Bahan Pendampingan dan Kerja Sama Antar Lembaga	6
792.	Penyusun Bahan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	6
793.	Penyusun Bahan Analisis dan Perizinan TKA Sektor Industri	6
794.	Pemeriksa Kelengkapan Berkas RPTKA Industri	6
795.	Penyusun Bahan Analisis dan Perizinan TKA Sektor Jasa	6

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
796.	Pemeriksa Kelengkapan Berkas RPTKA Jasa	6
797.	Penyusun Bahan Analisis dan Perizinan TKA Sektor Pertanian dan Maritim	6
798.	Penyusun Bahan Analisis Perizinan TKA Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6
	PELAKSANA DI DITJEN BINA PHI DAN JAMSOS	
799.	Analisis Peraturan Perusahaan	7
800.	Analisis Perjanjian Kerja Bersama	7
801.	Analisis Fasilitasi Perjanjian Kerja	7
802.	Analisis Pengembangan Perjanjian Kerja	7
803.	Analisis Pencegahan Diskriminasi Syarat Kerja	7
804.	Analisis Pengembangan Syarat Kerja Tanpa Diskriminasi	7
805.	Analisis Evaluasi Kesejahteraan Pekerja	7
806.	Analisis Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	7
807.	Analisis Standarisasi Pengupahan	7
808.	Analisis Fasilitasi Pengupahan	7
809.	Analisis Pengembangan Sistem Pengupahan	7
810.	Analisis Pengupahan	7
811.	Analisis Program, Iuran dan Manfaat Jaminan Sosial	7
812.	Analisis Pengembangan dan Evaluasi Kerjasama Antar Lembaga	7
813.	Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam dan Luar Hubungan Kerja	7
814.	Analisis Analisis dan Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial	7
815.	Analisis Organisasi Pekerja	7
816.	Analisis Organisasi Pengusaha	7
817.	Analisis Lembaga Kerjasama Bipartit	7
818.	Analisis Lembaga Kerjasama Tripartit	7
819.	Analisis Kerjasama Hubungan Industrial	7
820.	Analisis Pemasyarakatan Hubungan Industrial	7
821.	Analisis Deteksi Dini	7
822.	Analisis Penanganan Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	7
823.	Analisis Pemberdayaan Penyelesaian Secara Bipartit	7
824.	Analisis Pemberdayaan Penyelesaian Secara Mediasi	7
825.	Analisis Pemberdayaan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7
826.	Analisis Jabatan Fungsional Mediator	7
827.	Penyusun Bahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	6
828.	Penyusun Bahan Hubungan Kerja	6
829.	Penyusun Bahan Kesetaraan Syarat Kerja	6
830.	Penyusun Bahan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	6
831.	Penyusun Bahan Standarisasi dan Fasilitasi Pengupahan	6
832.	Penyusun Bahan Pengembangan Pengupahan	6
833.	Penyusun Bahan Pembinaan Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga	6

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
834.	Penyusun Bahan Kepesertaan Jaminan Sosial	6
835.	Penyusun Bahan Pemberdayaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha	6
836.	Penyusun Bahan Kelembagaan Hubungan Industrial	6
837.	Penyusun Bahan Kerjasama dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	6
838.	Penyusun Bahan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	6
839.	Penyusun Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	6
840.	Penyusun Bahan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	6
	PELAKSANA DI DITJEN BINWASNAKER DAN K3	
841.	Analisis Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	7
842.	Analisis Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	7
843.	Analisis Pengawasan Norma Hubungan Kerja	7
844.	Analisis Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat	7
845.	Analisis Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	7
846.	Analisis Pengawasan Norma Pengupahan	7
847.	Analisis Pengawasan Norma Kompensasi Jamsostek	7
848.	Analisis Pengawasan Norma Kepesertaan dan Kerjasama Antar Lembaga Badan Penjamin Jaminan Sosial	7
849.	Analisis Pengawasan Norma Perlindungan Fungsi Reproduksi	7
850.	Analisis Pengawasan Norma Perlindungan Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari	7
851.	Analisis Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Pengupahan, Jamsos dan Kesejahteraan Pekerja	7
852.	Analisis Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan	7
853.	Analisis Pengawasan Norma Kerja Anak dalam Pekerjaan Ringan dan Pelatihan Kerja	7
854.	Analisis Pengawasan Norma Kerja Anak dalam Pekerjaan Mengembangkan Bakat Minat	7
855.	Analisis Pengawasan Norma Bentuk2 Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Dalam Hubungan Kerja	7
856.	Analisis Pengawasan Norma Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Luar Hubungan Kerja	7
857.	Analisis Pengawasan Norma Mekanik	7
858.	Analisis Pengawasan Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	7
859.	Analisis Pengawasan Norma Konstruksi dan Bangunan	7
860.	Analisis Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	7
861.	Analisis Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja	7
862.	Analisis Pengawasan Norma Pengendalian Penyakit Akibat Kerja	7
863.	Analisis Pengawasan Norma Ergonomi dan Lingkungan Kerja	7
864.	Analisis Pengawasan Norma Bahan Berbahaya	7

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
865.	Analisis Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3	7
866.	Analisis Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3	7
867.	Analisis Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	7
868.	Analisis Tatalaksana Pengawasan Ketenagakerjaan	7
869.	Analisis Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan	7
870.	Analisis Sarana dan Prasarana Pengawasan Ketenagakerjaan	7
871.	Analisis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	7
872.	Analisis Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
873.	Analisis Penyidikan Tindak Pidana Norma Ketenagakerjaan	7
874.	Analisis Penyidikan Tindak Pidana Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
875.	Analisis Sarana K3	7
876.	Analisis Fasilitas K3	7
877.	Analisis Pengkajian K3	7
878.	Analisis Standardisasi K3	7
879.	Analisis Kompetensi K3	7
880.	Analisis Evaluasi Kompetensi K3	7
881.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	6
882.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	6
883.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pengupahan	6
884.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Jamsostek	6
885.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	6
886.	Penyusun Bahan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan	6
887.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Perlindungan Pekerja Anak	6
888.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	6
889.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekanan	6
890.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	6
891.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	6
892.	Penyusun Bahan Pengawasan Ergonomi, Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	6
893.	Penyusun Bahan Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	6
894.	Penyusun Bahan Pengawas Ketenagakerjaan dan Tatalaksana	6
895.	Penyusun Bahan Lembaga dan Sarana Pengawasan Ketenagakerjaan	6
896.	Penyusun Bahan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dan K3	6
897.	Penyusun Bahan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dan K3	6
898.	Penyusun Bahan Sarana dan Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
899.	Penyusun Bahan Pengkajian dan Standardisasi K3	6
900.	Penyusun Pengembangan Sumber Daya Manusia K3	6
	PELAKSANA DI INSPEKTORAT JENDERAL	
901.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7
902.	Analisis Pengawasan Masyarakat	7
903.	Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	7
	PELAKSANA DI BARENBANG KETENAGAKERJAAN	
904.	Analisis Pengukuran Pembangunan Ketenagakerjaan	7
905.	Analisis Evaluasi Pengukuran Ketenagakerjaan	7
906.	Analisis Perencanaan Ketenagakerjaan Sektoral	7
907.	Analisis Perencanaan Ketenagakerjaan Daerah	7
908.	Analisis Perencanaan Ketenagakerjaan Perusahaan Negara	7
909.	Analisis Perencanaan Ketenagakerjaan Perusahaan Swasta	7
910.	Analisis Data dan Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	7
911.	Analisis Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja	7
912.	Analisis Data dan Informasi Hubungan Industrial	7
913.	Analisis Data dan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan	7
914.	Analisis Pengembangan Sistem Informasi	7
915.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Informatika	7
916.	Analisis Penyajian Informasi Ketenagakerjaan	7
917.	Analisis Penelitian Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	7
918.	Analisis Penelitian Penempatan Tenaga Kerja	7
919.	Analisis Penelitian Hubungan Industrial	7
920.	Analisis Penelitian Pengawasan Ketenagakerjaan	7
921.	Analisis Kajian Kebijakan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	7
922.	Analisis Kajian Kebijakan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	7
923.	Penyusun Bahan Pengukuran dan Evaluasi Pembangunan	6
924.	Penyusun Bahan Perencanaan Ketenagakerjaan Makro	6
925.	Penyusun Bahan Perencanaan Ketenagakerjaan Mikro	6
926.	Penyusun Bahan Data dan Informasi Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja	6
927.	Penyusun Bahan Data dan Informasi Hub. Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	6
928.	Penyusun Bahan Pengemb. SI & Sumber Daya Informatika	6
929.	Penyusun Bahan Penelitian Pelatihan, Produktivitas, Dan Penempatan Tenaga Kerja	6
930.	Penyusun Bahan Penelitian Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan	6
931.	Penyusun Bahan Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan	6
	PELAKSANA DI BALAI-BALAI KETENAGAKERJAAN	
932.	Analisis Pelayanan Teknis	7

NO.	NAMA JABATAN ADMINISTRASI	KELAS JABATAN
1	2	3
933.	Analisis Penyelenggaraan	7
934.	Analisis Pemberdayaan	7
935.	Analisis Penyelenggaraan dan Pemberdayaan (BPP dan BLK Kelas II)	7
936.	Analisis Pelayanan Pengujian dan Pemeriksaan	7
937.	Analisis Pengkajian	7
938.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan dan Pemeriksaan	6
939.	Penyusun Bahan Pelayanan Teknis	6
940.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan	6
941.	Penyusun Bahan Pemberdayaan	6

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001